

## ABSTRAK

**ACHMAD IMAM LAHAYA, Nomor Pokok B 111 09 315**, Program Studi Hukum Pidana, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi dengan judul ” **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo. Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO)**” di bawah bimbingan **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.** dan **Kaisaruddin, S.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus ini.

Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu di Pengadilan Negeri Jeneponto.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan yang diperlukan adalah a).

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis. b). Penelitian Pustaka (*Library Research*), yakni data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder yang tujuannya untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini

nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO.

kurang tepat. Hakim tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair. 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo

Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO juga kurang tepat. Beberapa pertimbangan Hakim yang keliru sehingga memutus para terdakwa hanya melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dan percobaan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan masih kurang dipahami oleh para praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Banyaknya pendapat berbeda dikalangan para pakar hukum pidana sendiri mengenai penyertaan menggambarkan bahwa penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh

pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut.

Kasus Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/PID.B/2011/PN.JO. ini merupakan kasus penyertaan tindak pidana pembunuhan yang pelakunya terdiri 5 (lima) orang dan korbannya 3 (tiga) orang, yang mana 2 (dua) korban meninggal dunia dan 1 (orang) mengalami luka berat. Dalam putusannya, hakim menyatakan semua terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban I. Terhadap korban II, hakim menyatakan Pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II. Sedangkan terhadap korban III yang mengalami luka berat, hakim menyatakan semua terdakwa sebagai pelaku percobaan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai penyertaan dan percobaan tindak

pidana pembunuhan sehingga Penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan” ”(Studi Kasus Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo. Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO).”.

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO.

### **PEMBAHASAN**

**Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO**

Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum

dengan bentuk dakwaan kombinasi yaitu Kesatu, primair: didakwa dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair: Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Lebih Subsidair: Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; DAN Kedua, primair: Pasal 53 ayat (1) KUHP Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair: Pasal 53 ayat (1) Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Lebih Subsidair: Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU Ketiga: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; DAN Keempat: Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Berdasarkan dakwaan kombinasi tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu yang dikumulatitkan dengan Dakwaan Kedua, atau Dakwaan ketiga yang dikumulatitkan dengan Dakwaan Keempat.

Masing-masing Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua disusun secara Subsidiaritas, maka Dakwaan Primair

akan dipertimbangkan terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair, dan jika Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair. Dakwaan bersifat berlapis (juncto Pasal 55 KUHP) karena kasus ini dilakukan lebih dari satu orang.

Penerapan hukum pidana materil dalam kasus ini kurang tepat. Penuntut Umum dalam dakwaannya telah benar yang tuntutananya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair.

Meskipun hakim tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum dengan hanya memutus para terdakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Subsidiar (Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 53 ayat (1) Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), namun ada beberapa pertimbangan yang harusnya dipertimbangkan sehingga seharusnya hakim memutus tindak pidana yang para pelaku lakukan adalah Perencanaan Tindak Pidana Perencanaan Pembunuhan Secara Bersama-sama dan Perencanaan Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yang akan diuraikan secara jelas pada pembahasan rumusan masalah selanjutnya (Pertimbangan Hakim).

Kemudian apabila dikaitkan dengan kasus dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka

unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dijatuhkan ke persidangan karena adanya Dakwaan Penuntut Umum. Dimana yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2., Terdakwa 3., Terdakwa 4. dan Terdakwa 5..

#### 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu:

Unsur ini terdapat 2 unsur 2 (dua) sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”.

“Dengan Sengaja” maksudnya adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki, artinya perbuatan tersebut benar-benar

diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga dalam prakteknya kesengajaan digolongkan 3 (tiga) bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian, (*opzet bij noodzakelijkheid*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan para pelaku. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari perbuatan para pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan dan berakibat orang lain meninggal dunia dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku tidak berusaha mencegah perbuatan atau menurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan tujuan berpotensi kematian, berdasarkan penikaman yang dilakukan para korban di beberapa titik anatomi tubuh, dan diantaranya organ vital, dengan demikian perbuatan berupa penikaman pada organ vital berpotensi timbulnya akibat berupa kematian. Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Selanjutnya yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu" adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu:

1. Memutuskan kehendak dengan keadaan tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Penikaman terhadap korban T dan korban HK di sungai yang berlangsung sangat cepat, yaitu kurang lebih setengah menit dan kejadian penikaman tersebut berlangsung dalam situasi yang sangat emosional (membabi buta) dan seketika itu juga, sehingga siapapun yang datang untuk melerai akan terkena tikaman dari para pelaku, dalam hal ini Korban Z yang datang melerai.

Adanya keadaan yang sangat emosional (membabi buta) dan seketika itu juga dalam tenggang waktu yang cepat, kejadian tersebut tidak memungkinkan bagi masing-masing para terdakwa memikirkan cara dengan tenang untuk melakukan perbuatannya, dengan demikian unsur dengan sengaja menurut hakim tidak terpenuhi (belum cukup untuk menentukan atau menunjukan adanya fakta bahwa para terdakwa telah merencanakan pembunuhan terhadap Korban T dan Z),

### 3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Akibat perbuatan para pelaku maka 2 (dua) orang korban meninggal dunia seketika itu juga atau beberapa saat setelahnya di tempat kejadian serta 1 (satu) orang mengalami luka-luka berat

### 4. Unsur Percobaan Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Syarat-syarat “percobaan”, yaitu:

- a. Adanya niat atau maksud (*voornemen*) dari pelaku;
- b. Adanya perbuatan dari pelaku (mulai melaksanakan maksud/*begin van uitvoering*);
- c. Perbuatan tersebut tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab diluar kehendak;

Penguasaan senjata tajam pada para terdakwa secara tidak sah berpotensi timbulnya perbuatan, dan faktanya saat kejadian para terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut karena suatu impuls yang muncul saat itu juga, dan impuls tersebut menimbulkan suatu perbuatan. Berdasarkan hal tersebut maka “niat atau maksud” dari para terdakwa muncul saat kejadian,

sehingga syarat “niat atau maksud” telah ada pada para terdakwa.

Para terdakwa menikam Korban HK secara berkerumun, dengan demikian syarat “perbuatan atau mulai melaksanakan maksud” telah terpenuhi. Kemudian para terdakwa berhenti menikam karena mengira Korban HK sudah meninggal, maka diperoleh kesimpulan yang ditarik sebagai fakta bahwa perbuatan para terdakwa berhenti bukan karena kemauannya sendiri tetapi para terdakwa mengira bahwa Korban HK telah meninggal dan dengan fakta tersebut maka syarat “Perbuatan tersebut tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian dalam surat dakwaan, semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, terdakwa 1 (satu) dengan yang lainnya dibebani tanggungjawab yang sama, yakni masing-masing dibebani tanggung

jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*), yang mana masing-masing para terdakwa adalah pelaku penikaman terhadap Korban T, sedangkan pelaku penikaman terhadap Korban Z adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan demikian terhadap Korban T masing-masing para terdakwa berkedudukan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), sedangkan terhadap Korban Z masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II berkedudukan sebagai *pleger*. Adapun terhadap Korban HK masing para terdakwa juga berkedudukan sebagai orang yang melakukan (*pleger*).

Dari segi pertanggungjawaban pidananya, keadaan para terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi beban para terdakwa, dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum.

**Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO**



Berdasarkan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa, ada kaitan antara pembedaan dengan fakta-fakta serta keadaan yang meliputi kasus ini. Salah satu poin yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, alasan hakim tidak menggunakan Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perencanaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Bersama-sama. Pertimbangan hakim bahwa adanya keadaan yang sangat emosional (membabi buta) dan seketika itu juga dalam tenggang waktu yang cepat, kejadian tersebut tidak memungkinkan bagi masing-masing para terdakwa untuk memikirkan cara yang tenang untuk melakukan perbuatannya. Sehingga perbuatan para terdakwa belum cukup untuk menentukan atau menunjukan adanya fakta bahwa para terdakwa telah merencanakan pembunuhan.

Hakim juga harusnya mempertimbangkan bahwa banyak indikasi yang mengarah bahwa

kasus ini adalah perencanaan tindak pidana pembunuhan kepada Korban T dan perencanaan percobaan tindak pidana pembunuhan kepada Saksi HK.

Pertama, awalnya masalah pertengkaran antara Terdakwa I dengan Korban HK yang tidak lain adalah saudara kandung, adalah soal warisan, artinya ada masalah sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesepakatan antara para terdakwa untuk membunuh korban, yang karena masalah itulah yang dapat menjadi alasan untuk para terdakwa untuk merencanakan tindak pidana pembunuhan. Kedua, berkumpulnya para terdakwa secara bersama-sama disatu tempat yang mereka telah sepakati sebelumnya kemudian berangkat bersama-sama ke TKP (tempat kejadian perkara) dengan membawa senjata tajam, masing-masing Terdakwa I, II, III, dan IV berupa badik dan Terdakwa V parang. Dipersidangan para terdakwa mengatakan mereka membawa senjata tajam karena di sekitar sawah yang menjadi tempat

kejadian perkara ada anjing gila dan banyak pencuri motor. Namun pernyataan korban dibantah oleh para saksi bahwa di tempat tersebut tidak ada anjing gila atau pencuri motor. Sehingga dapatlah ditarik kesimpulan sangat kuat dugaan bahwa para terdakwa berbohong dan para terdakwa membawa senjata tajam untuk melakukan tindak pidana pembunuhan yang ditujukan kepada korban berinisial T dan Korban HT.

Adapun Pertimbangan hakim bahwa adanya keadaan yang sangat emosional (membabi buta) dan seketika itu juga dalam tenggang waktu yang cepat, kejadian tersebut tidak memungkinkan bagi masing-masing para terdakwa untuk memikirkan cara yang tenang untuk melakukan perbuatannya, sehingga siapapun yang datang untuk melerai akan terkena tikaman dari para terdakwa, dalam hal ini Korban Z yang datang melerai. Dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut “belum cukup” untuk menentukan atau menunjukan adanya fakta bahwa para terdakwa

merencanakan pembunuhan terhadap korban T dan Z.

Menurut hemat Penulis disini terdapat kekeliruan karena keadaan yang sangat emosional (membabi buta) sehingga siapapun yang datang akan ditikam kurang tepat karena para terdakwa memang telah merencanakan pembunuhan kepada korban T dan Saksi HK, adapun datangnya Korban Z yang menyebabkan Korban Z juga dibunuh oleh para pelaku karena Korban Z berusaha melerai dan menolong korban, sehingga pelaku juga membunuh Z. Ini sesuai dengan *dolus premeditatus* dan *dolus repentinus*, yaitu yang pertama merupakan kesengajaan yang dilakukan dengan telah dipertimbangkan masak-masak lebih dahulu dalam hati yang tenang (terhadap Korban T dan Korban HK), sedangkan yang kedua merupakan kesengajaan dengan sekonyong-konyong (terhadap Korban Z). Jadi dalam menentukan apakah sebuah tindak pidana tergolong tindak pidana pembunuhan biasa atau

pembunuhan berencana itu dapat dilihat dari perencanaan tindakannya (dalam hal ini tindak pidana pembunuhan) bukan dari modus operandi perbuatan tersebut (tindak pidana pembunuhan).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. kurang tepat. Hakim tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu

Primair dan Percobaan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair.

2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO juga kurang tepat yakni hanya memutuskan para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dan percobaan tindak pidana secara bersama-sama , seharusnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan hakim memutuskan perbuatan para terdakwa ialah Perencanaan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama dan Perencanaan Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan.

### **SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1) Dalam peningkatan supremasi hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim sebaiknya lebih memahami tentang asa-asis hukum pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pidana materil. Kemudian dalam menentukan tindak pidana pembunuhan biasa atau tindak pidana pembunuhan berencana, Hakim harusnya melihat perencanaan pelaksanaan bukan modus operandinya.

2) Majelis Hakim dalam memutus suatu harus lebih mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur delik, juga Majelis Hakim turut mempertimbangkan berat-ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan-keadaan pribadi terdakwa yang melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana;

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku teks

Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana* 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Abidin, Zainal dan Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_.2011. *Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.

Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Marpaung, Laden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Pemberantasan dan

- Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Prodjodikoro, Wirjono.. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono.. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumnid.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tena, Yulies. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [http://lielylaw.multiply.com/journal/item/69/Ajaran-Percobaan-Penyertaan-Gabungan-Delik-dan-Delik-Aduan-Dalam-Hukum-Pidana?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://lielylaw.multiply.com/journal/item/69/Ajaran-Percobaan-Penyertaan-Gabungan-Delik-dan-Delik-Aduan-Dalam-Hukum-Pidana?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem) (Diambil dari internet pada tanggal 7-11-2012 pukul 19.23)
- <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-6-Percobaan-Poging.pdf> (Diambil dari internet pada tanggal 7-11-2012 pukul 19.28)

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

